



The Discourse of the 1945 Indonesian Proclamation of Independence in Digital Spaces: A Semiotic Analysis of Digital Citizenship Literacy among Civic Education Students

**Lianda Dewi Sartika¹, Anak Agung Ngurah Bagus Janitra Dewanta²,
Ayunda Wulandari³**

liandadewi@staff.unram.ac.id

^{1, 2, 3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

ABSTRACT

In an era of social media characterised by the rapid production and consumption of digital narratives, the discursive construction of the 1945 Indonesian Independence Proclamation is no longer confined to formal classrooms but is massively reconstructed through content on Instagram, TikTok, and YouTube, carrying ideological messages that potentially shape the civic understanding of the younger generation. This article examines that discursive construction using Roland Barthes' semiotic framework, encompassing denotative, connotative, and mythological layers of meaning, combined with a digital media literacy approach, while simultaneously investigating how PPKn students critically consume, interpret, and evaluate proclamation-related content. The study employs a qualitative approach with multimodal semiotic analysis as the primary method, supported by phenomenological interviews with purposively selected PPKn student informants. Data were collected through systematic documentation of proclamation-themed social media content and semi-structured in-depth interviews. The findings reveal that proclamation narratives on social media are predominantly constructed through nationalist-heroic myth frameworks, with significant gaps between the ideological messages encoded in the content and the critical interpretive capacity of PPKn students as civic actors. This research contributes to the intersection of semiotic studies, digital media literacy, and civic education, and recommends the integration of semiotic analysis competencies into PPKn curricula to strengthen students' capacity as critically literate digital citizens.

Keywords: civic literacy; digital media; proclamation narrative; semiotics; social media.

PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memiliki dimensi kewarganegaraan yang krusial dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peristiwa proklamasi menjadi salah satu muatan nilai kebangsaan yang wajib dipahami secara kritis oleh setiap warga negara. Namun demikian, di era media sosial yang ditandai oleh percepatan produksi dan konsumsi informasi, narasi tentang proklamasi tidak lagi bersumber semata-mata dari buku teks atau ruang kelas formal, melainkan dikonstruksi ulang secara masif melalui konten digital di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Konten-konten ini membawa muatan ideologis, semiotik, dan wacana tertentu yang berpotensi membentuk atau mendistorsi pemahaman kewarganegaraan generasi muda.

Mahasiswa PPKn sebagai calon pendidik kewarganegaraan memiliki posisi strategis yang unik, tidak hanya menjadi konsumen konten digital, tetapi kelak akan menjadi agen yang menerjemahkan narasi kebangsaan kepada peserta didik. Kemampuan mereka dalam membaca secara kritis tanda-tanda semiotik dalam konten proklamasi digital, membedakan antara denotasi, konotasi, dan mitos yang dibangun, merupakan komponen penting dari literasi kewarganegaraan digital (*digital civic literacy*) yang belum banyak diteliti. Realitas menunjukkan bahwa konten sejarah proklamasi di ruang digital kerap hadir dalam format yang disederhanakan, dibingkai secara nasionalistis-heroik, atau bahkan terdistorsi melalui disinformasi, sehingga menuntut kemampuan analisis semiotik kritis dari konsumennya.

Sejumlah penelitian terkini telah mengkaji berbagai aspek yang bersinggungan dengan tema ini. Sumiatun et al., (2026) meneliti peran literasi digital dalam penguatan kompetensi kewarganegaraan di era post-truth, namun fokusnya pada literasi digital secara umum tanpa menyentuh dimensi semiotik konten sejarah. Nuryadi et al., (2023) mengkaji penguatan *civic literacy* mahasiswa melalui literasi digital dalam konteks Society 5.0, dengan temuan bahwa *civic literacy* digital mahasiswa masih memerlukan penguatan sistematis. Purwantiningsih et al., (2022) menganalisis kewarganegaraan digital di Indonesia dengan fokus pada kesopanan digital, tanpa mendalami aspek analisis wacana konten sejarah. Dari sisi semiotika, Mukodas et al., (2025) menerapkan semiotika Roland Barthes pada postingan bertema politik di Instagram, sementara penelitian semiotika pada konten bertema kesejarahan masih sangat terbatas.

Di bidang pendidikan kewarganegaraan digital, Rahayu et al., (2025) mengkaji literasi digital dalam pembelajaran PKn berbasis saintifik untuk penguatan *civic disposition* mahasiswa, dan Safiqa et al., (2024) mengeksplorasi peluang dan tantangan pemanfaatan literasi digital dalam pendidikan politik mahasiswa PPKn. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan perkembangan kajian literasi digital dalam PPKn yang signifikan, namun memiliki keterbatasan bersama: tidak ada yang mengintegrasikan analisis semiotik terhadap konten sejarah proklamasi di media sosial dengan pengukuran literasi kewarganegaraan digital mahasiswa PPKn secara simultan.

Terdapat kesenjangan akademis yang signifikan antara kajian semiotika media sosial, kajian literasi digital kewarganegaraan, dan kajian pendidikan sejarah kebangsaan dalam konteks PPKn. Penelitian yang ada umumnya bersifat parsial, yakni hanya mengkaji semiotika tanpa mengaitkannya dengan literasi kewarganegaraan, atau mengkaji literasi digital tanpa memperhatikan bagaimana konten kesejarahan dikonstruksi secara semiotik di ruang digital. Lebih spesifik lagi, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis wacana proklamasi kemerdekaan 1945 dikonstruksi melalui tanda-tanda semiotik di platform media sosial dan bagaimana konstruksi wacana tersebut direspons oleh mahasiswa PPKn dalam kapasitas mereka sebagai warga negara digital yang (diharapkan) kritis.

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi wacana proklamasi kemerdekaan 1945 di media sosial melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, yang meliputi analisis denotasi, konotasi, dan mitos; (2) mengkaji literasi kewarganegaraan digital mahasiswa PPKn dalam mengonsumsi dan memaknai konten proklamasi di media sosial; serta (3) mengidentifikasi implikasi temuan semiotik terhadap penguatan literasi kewarganegaraan digital dalam pembelajaran PPKn. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga bidang keilmuan yang sebelumnya terpisah, yaitu semiotika teks media (Bahasa Indonesia), literasi media digital (Bahasa Inggris), dan pendidikan kewarganegaraan (PPKn) dalam satu kerangka analisis yang kohesif, dengan subjek dan objek penelitian yang spesifik dan belum pernah dikaji sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua metode yang diintegrasikan: (1) analisis semiotika multimodal berbasis teori Roland Barthes untuk menganalisis konten proklamasi di media sosial; dan (2) wawancara fenomenologis untuk mengkaji literasi kewarganegaraan digital mahasiswa PPKn. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna dan konstruksi wacana secara mendalam, bukan mengukur frekuensi atau hubungan statistik (John W. Creswell, 2018). Integrasi dua metode ini memungkinkan penelitian untuk menjawab dua dimensi pertanyaan secara simultan, yaitu bagaimana wacana proklamasi dikonstruksi di ruang digital, dan bagaimana mahasiswa PPKn memaknai konstruksi tersebut sebagai warga negara digital.

Objek penelitian pada dimensi semiotik adalah konten digital bertema proklamasi kemerdekaan 1945 yang beredar di tiga platform media sosial utama: Instagram, TikTok, dan YouTube. Konten dipilih secara purposif menggunakan teknik *sampling* kriteria (*criterion sampling*) dengan kriteria: (a) memuat tema proklamasi kemerdekaan 1945 secara eksplisit; (b) diunggah dalam periode 12 bulan terakhir; (c) memiliki jangkauan interaksi tinggi (*likes*, komentar, dan berbagi di atas rata-rata); dan (d) berasal dari akun individu, komunitas, maupun institusi. Target sampel: 15-20 konten dari masing-masing platform (total 45-60 unit konten). Subjek penelitian pada dimensi literasi kewarganegaraan digital adalah mahasiswa PPKn aktif di FKIP Universitas Mataram yang dipilih secara purposif dengan kriteria: (a) aktif menggunakan media sosial minimal 3 jam/hari; (b) pernah mengonsumsi konten sejarah proklamasi di media sosial; dan (c) berada pada semester 3-7. Jumlah informan: 10-12 orang, atau sampai tercapai saturasi data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur: (1) dokumentasi dan arsip konten digital. Mengunduh dan mencatat seluruh elemen multimodal konten terpilih (teks verbal, gambar, video, caption, *hashtag*, komentar) menggunakan lembar dokumentasi terstruktur yang dikembangkan berdasarkan tiga dimensi analisis Barthes; dan (2) wawancara semi-terstruktur mendalam kepada mahasiswa PPKn menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan indikator literasi kewarganegaraan digital. Analisis data dilakukan melalui empat tahap: (1) analisis semiotik tiga lapis Barthes pada setiap unit konten dan identifikasi denotasi (makna literal), konotasi (makna kultural/ideologis), dan mitos (sistem makna yang dinaturalisasi); (2) koding tematik terhadap data wawancara menggunakan NVivo atau manual coding; (3) triangulasi antara temuan semiotik dan temuan literasi mahasiswa; serta (4) interpretasi implikasi pedagogis untuk PPKn. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking* terhadap informan, serta *peer debriefing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Semiotik Wacana Proklamasi di Media Sosial

Analisis semiotika Roland Barthes terhadap 52 unit konten proklamasi kemerdekaan 1945 yang dikumpulkan dari Instagram (18 konten), TikTok (17 konten), dan YouTube (17 konten) mengungkapkan tiga pola konstruksi wacana yang beroperasi secara konsisten di ketiga platform. Meskipun setiap platform memiliki modalitas semiotik yang khas, seluruh konten menunjukkan cara kerja tiga lapis makna Barthesian yang saling memperkuat.

Pada tingkat denotasi, ketiga platform menampilkan representasi literal yang berbeda sesuai formatnya masing-masing. Konten Instagram didominasi oleh *carousel* foto hitam-putih bersejarah, infografis bertema kebangsaan, dan *reels* animasi singkat detik-detik proklamasi. Konten TikTok hadir dalam format video *re-enactment* pendek (15–60 detik) di mana kreator memerankan kembali momen pembacaan proklamasi, sementara konten YouTube menyajikan dokumenter dan video animasi edukatif berdurasi lebih panjang. Pada tingkat konotasi, setiap platform membangun muatan ideologis yang khas. Di Instagram, filter kontras tinggi pada foto

arsip dan tipografi kapital tebal pada kata “MERDEKA!” mengonstruksi konotasi ‘heroisme dan determinasi nasional yang tak terbendung’. Di TikTok, teknik *direct address*, kreator menatap kamera sambil membacakan proklamasi dan menciptakan ilusi intimasi yang membangun konotasi ‘pesan kemerdekaan yang masih hidup dan personal’. Di YouTube, gaya narasi *voice-over* akademis dan *footage* arsip mengonstruksi konotasi ‘otoritas historis’, memberi kesan bahwa versi yang disajikan adalah satu-satunya versi yang terverifikasi.

Pada tingkat mitos, yang merupakan temuan paling signifikan dalam analisis ini adalah ketiga platform secara konsisten membangun dan mereproduksi mitos ‘kemerdekaan sebagai anugerah perjuangan elite nasional’. Mitos ini bekerja dengan cara berbeda di setiap platform: Instagram mengandalkan estetika visual yang memuliakan figur pemimpin; TikTok menggunakan afeksi dan viralitas untuk menggantikan refleksi historis; YouTube memanfaatkan otoritas akademis untuk melegitimasi narasi yang sudah disederhanakan. Meskipun modalitasnya berbeda, ketiga platform bermuara pada konstruksi ideologis yang sama: proklamasi adalah peristiwa segelintir tokoh besar, yaitu Sukarno, Hatta, dan golongan muda, tanpa menampilkan kontribusi rakyat biasa, perempuan, atau kelompok marginal yang turut berjuang. Barthes (2020) menjelaskan bahwa mitos bekerja bukan dengan menyembunyikan kebenaran, melainkan dengan menaturalisasikan ideologi sehingga tampak sebagai ‘fakta alamiah’ dan mekanisme itulah yang bekerja secara masif melalui pengulangan simbolik di ruang digital. Temuan ini sejalan dengan analisis (Mukodas et al., 2025) bahwa konten media sosial bertema kesejarahan cenderung memperkuat struktur kekuasaan dominan, sekaligus memperluas temuan tersebut ke dimensi lintas-platform yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Temuan di atas memperlihatkan bahwa perbedaan modalitas antarpelatform tidak sekadar bersifat teknis, melainkan mencerminkan perbedaan strategi semiotik dalam memproduksi dan mempertahankan mitos nasionalis. Platform Instagram, dengan karakteristik visualitasnya yang tinggi, mengandalkan estetika arsip sebagai mekanisme otentifikasi foto hitam-putih yang sudah dikenal luas berfungsi sebagai “bukti” yang melegitimasi narasi tanpa perlu verifikasi lebih lanjut. Sementara itu, TikTok mengeksplorasi logika viralitas dan kedekatan emosional antara kreator dan penonton, menciptakan apa yang oleh Mogenssen, (2014) disebut sebagai “*spreadable media*”, yaitu konten yang menyebar bukan karena akurasi historisnya, melainkan karena resonansi afektifnya. YouTube, di sisi lain, membangun otoritas melalui durasi dan gaya presentasi akademis yang mereplikasi format dokumenter televisi, sehingga konstruksi narasi tunggal tersamarkan di balik kesan komprehensivitas. Ketiga strategi ini secara sinergis berkontribusi pada reproduksi mitos nasionalistis-heroik yang menjadi temuan utama penelitian ini.

Dimensi pemarginalan yang ditemukan dalam analisis mitos ini memiliki implikasi serius bagi pembentukan kesadaran sejarah generasi muda. Ketika narasi proklamasi secara konsisten dan berulang hanya menampilkan Sukarno dan Hatta sebagai aktor tunggal kemerdekaan, terjadi proses apa yang oleh (Hall, 1997) disebut sebagai “representasi yang tidak berimbang”, di mana kelompok-kelompok yang secara historis turut berperan, termasuk perempuan pejuang seperti SK Trimurti dan Rasuna Said, tokoh-tokoh daerah, serta rakyat biasa yang terlibat dalam pergolakan kemerdekaan, secara sistematis disingkirkan dari memori kolektif digital. Proses pemarginalan semiotik ini tidak terjadi secara sengaja oleh para kreator konten, melainkan merupakan produk dari internalisasi mitos yang sudah terkodifikasi dalam kurikulum pendidikan formal dan kemudian direproduksi secara digital tanpa refleksi kritis. Inilah yang menjadikan temuan konstruksi semiotik ini relevan untuk dikaitkan langsung dengan kapasitas literasi kewarganegaraan digital mahasiswa PPKn yang akan dibahas pada subbagian berikut.

Tabel 1. Pola Konstruksi Semiotik Barthes pada Konten Proklamasi di Tiga Platform Media Sosial

Dimensi Barthes	Karakteristik Konten Instagram	Karakteristik Konten TikTok	Karakteristik Konten YouTube
Denotasi	Foto hitam-putih tokoh, teks proklamasi	Video <i>short</i> pendek <i>re-enactment</i>	Dokumenter dan animasi sejarah
Konotasi	Heroisme, keberanian, nasionalisme	Nostalgia, semangat, identitas generasi	Otoritas historis, kedalaman narasi
Mitos	Kemerdekaan = perjuangan elite	Proklamasi = momen viral kebangsaan	Sejarah = narasi resmi tunggal
Mekanisme Dominan	Estetika visual heroik; figur tunggal dimuliakan	Afeksi massal; viralitas menggantikan refleksi historis	Otoritas akademis; narasi komprehensif semu

Literasi Kewarganegaraan Digital Mahasiswa PPKn dalam Mengonsumsi Konten Proklamasi

Temuan dari wawancara fenomenologis dengan 11 informan mahasiswa PPKn mengungkapkan variasi yang signifikan dalam kapasitas literasi kewarganegaraan digital mereka ketika berhadapan dengan konten proklamasi di media sosial. Berdasarkan analisis tematik terhadap data wawancara, kapasitas literasi informan dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: tinggi (3 informan), sedang (5 informan), dan rendah (3 informan). Kategorisasi ini didasarkan pada lima indikator yang dikembangkan dari kerangka *digital civic literacy*: kemampuan mengidentifikasi kredibilitas sumber, pemahaman konteks historis, kemampuan membaca konotasi ideologis, identifikasi mitos dalam narasi digital, dan sikap kritis terhadap representasi yang tidak berimbang.

Informan dengan literasi tinggi (I2, I7, I10) mampu melampaui pembacaan literal dan mengidentifikasi muatan ideologis dalam konten yang mereka konsumsi. I7 menyatakan: “Kalau saya perhatikan, hampir semua konten itu cuma nampilin Sukarno sama Hatta. Padahal kan banyak yang berjuang, termasuk perempuan-perempuan yang bahkan nggak pernah disebut namanya.” Pernyataan ini mencerminkan kemampuan membaca ketidakberimbangan representasi, yang merupakan salah satu indikator literasi kewarganegaraan digital tingkat lanjut yang relevan dengan temuan analisis semiotik. Informan kelompok sedang (I1, I3, I5, I8, I9) menunjukkan kemampuan identifikasi sumber dan konteks historis yang memadai, tetapi cenderung berhenti pada pembacaan literal tanpa mempertanyakan struktur representasi yang lebih dalam. I1 misalnya mengakui: “Saya tahu konten TikTok itu nggak selengkap buku sejarah, tapi tetap saja saya suka nonton karena lebih seru.” Respons ini mencerminkan kecenderungan untuk mendahulukan pengalaman estetis-afektif di atas pembacaan kritis, yaitu sebuah pola yang sejalan dengan cara kerja mitos TikTok yang mengutamakan viralitas emosional. Informan dengan literasi rendah (I4, I6, I11) cenderung menerima narasi konten secara afirmatif dan menganggapnya sebagai representasi historis yang akurat. I4 menyampaikan: “Saya senang nonton video proklamasi di YouTube, rasanya seperti menyaksikan langsung sejarah.” Pernyataan ini menunjukkan tidak adanya jarak kritis antara konsumen dan teks media, yang mengindikasikan kerentanan terhadap konstruksi mitos yang sudah diidentifikasi dalam analisis semiotik.

Temuan ini mengonfirmasi kajian Nuryadi (2023) bahwa *civic literacy* digital mahasiswa masih memerlukan penguatan sistematis, sekaligus menambahkan dimensi baru yang lebih spesifik, yaitu keterbatasan yang ditemukan bukan pada kemampuan teknis bermedia sosial, melainkan pada kapasitas mendekode mitos ideologis yang tertanam dalam konten proklamasi. Hal ini memperlihatkan kesenjangan mendasar antara *digital skills* dan *digital civic literacy*

mahasiswa yang sangat fasih menggunakan media sosial secara teknis belum tentu mampu membaca secara kritis konstruksi wacana yang ada di dalamnya. Kesenjangan inilah yang perlu direspons secara sistematis oleh kurikulum PPKn. Sebagaimana ditegaskan oleh Jones-Jang et al., (2021), bahwa *information literacy* memiliki kontribusi nyata dalam mengidentifikasi informasi yang menyesatkan, namun *literacy* jenis ini harus dikembangkan secara spesifik sesuai konteks, yang dalam hal ini, konteks analisis semiotik konten kesejarahan digital.

Tabel 2. Distribusi Tingkat Literasi Kewarganegaraan Digital Mahasiswa PPKn (n=11 informan)

Indikator Literasi Kewarganegaraan Digital	Tinggi	Sedang	Rendah
Identifikasi sumber dan kredibilitas konten	8 informan	2 informan	1 informan
Pemahaman konteks historis proklamasi	6 informan	3 informan	2 informan
Kemampuan membaca konotasi ideologis	4 informan	4 informan	3 informan
Identifikasi mitos dalam narasi digital	3 informan	4 informan	4 informan
Sikap kritis terhadap representasi tidak berimbang	3 informan	5 informan	3 informan

Data pada Tabel 2 di atas mengungkapkan pola yang perlu digarisbawahi, yaitu kapasitas literasi yang paling lemah justru terletak pada indikator “Identifikasi mitos dalam narasi digital”, di mana hanya 3 dari 11 informan yang menunjukkan kemampuan tinggi, sementara 4 informan berada pada kategori rendah. Pola ini berkorelasi secara langsung dengan temuan analisis semiotik yang menunjukkan bahwa mitos nasionalistis-heroik merupakan lapisan makna yang paling dominan sekaligus paling tersembunyi dalam konten proklamasi digital. Dengan kata lain, konten yang paling ideologis justru paling sulit dikenali oleh konsumennya. Fenomena ini selaras dengan penjelasan Barthes (2020) bahwa mitos bekerja justru dengan cara menyamar sebagai “pengetahuan umum” atau “fakta yang sudah diketahui semua orang”, sehingga semakin sulit dipertanyakan. Mahasiswa yang tumbuh dengan narasi proklamasi versi tertentu sejak sekolah dasar akan cenderung menerima reproduksi digital narasi tersebut sebagai konfirmasi, bukan sebagai konstruksi.

Menarik untuk dicatat bahwa variasi kapasitas literasi di antara informan tidak semata-mata berkorelasi dengan tingkat semester atau indeks prestasi akademik, melainkan lebih terkait dengan intensitas paparan terhadap konten analitik dan kritis di luar kurikulum formal, seperti kebiasaan membaca artikel opini, mengikuti akun akademisi di media sosial, atau terlibat dalam diskusi kritis di organisasi mahasiswa. Temuan ini mendukung argumen Hobbs (2010) bahwa literasi media tidak berkembang secara linier melalui pendidikan formal saja, melainkan memerlukan ekosistem pembelajaran yang mendorong refleksi kritis secara berkelanjutan. Bagi program studi PPKn, implikasi praktisnya adalah bahwa peningkatan literasi kewarganegaraan digital tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada satu atau dua mata kuliah, melainkan harus dibangun sebagai kapasitas lintas mata kuliah yang terintegrasi secara sistematis dalam keseluruhan pengalaman belajar mahasiswa, mulai dari pengenalan teori kewarganegaraan hingga praktik analisis konten digital di lapangan.

Implikasi Pedagogis: Semiotika sebagai Kompetensi Literasi Kewarganegaraan Digital dalam PPKn

Integrasi temuan semiotik dan temuan literasi kewarganegaraan digital menghasilkan implikasi pedagogis yang mendesak bagi pembelajaran PPKn. Terdapat tiga implikasi utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, kurikulum PPKn perlu mengintegrasikan kompetensi

analisis semiotik sebagai bagian inti dari literasi kewarganegaraan digital, bukan sekadar kemampuan *fact-checking*, tetapi kemampuan membongkar lapisan mitos yang tertanam dalam konten kebangsaan digital. Kompetensi ini mencakup kemampuan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan kritis: ‘Apa yang tidak terlihat dalam narasi ini?’, ‘Siapa yang tidak ditampilkan?’ dan ‘Kepentingan wacana apa yang sedang diproduksi?’ Kedua, model pembelajaran perlu dirancang secara platform-sensitif karena Instagram, TikTok, dan YouTube membangun mitos melalui mekanisme yang berbeda, maka pendekatan literasi kritis yang digunakan pun harus disesuaikan dengan modalitas semiotik masing-masing platform. Ketiga, temuan bahwa mahasiswa PPKn cenderung lebih responsif secara afektif-patriotik daripada secara analitis-kritis mengindikasikan bahwa pembelajaran harus dimulai dari pengakuan atas respons emosional tersebut, bukan mengabaikannya untuk kemudian secara bertahap membimbing mahasiswa melampaui respons afektif menuju pembacaan yang lebih kritis.

Implikasi ini sejalan dengan pandangan Budirahayu & Saud (2023) tentang perlunya inovasi pedagogis untuk ruang kelas demokratis di era digital, dan memperluas rekomendasi Sumiatun et al., (2026) dengan menambahkan dimensi analisis semiotik yang selama ini absen dari diskursus literasi digital dalam PPKn. Gonzalez-Mohino et al., (2023) juga menegaskan bahwa perangkat digital tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi kewarganegaraan tanpa disertai kompetensi literasi kritis yang memadai. Secara operasional, penelitian ini merekomendasikan pengembangan modul pembelajaran PPKn berbasis analisis semiotik konten digital kebangsaan yang dapat diintegrasikan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Digital. Modul ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan tiga kapasitas sekaligus: (1) kemampuan mengidentifikasi tiga lapisan makna Barthesian dalam konten digital; (2) kemampuan mengenali mekanisme mitos yang berbeda di setiap platform; dan (3) kemampuan merefleksikan posisi mereka sebagai warga negara digital yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, analisis semiotik tidak lagi dipandang sebagai keterampilan eksklusif akademisi, melainkan sebagai kompetensi kewarganegaraan yang esensial di era di mana narasi kebangsaan semakin banyak dikonstruksi dan dikonsumsi melalui layar digital.

Secara lebih konkret, integrasi kompetensi analisis semiotik dalam pembelajaran PPKn dapat diwujudkan melalui apa yang peneliti sebut sebagai pendekatan “Baca-Bongkar-Bangun” (3B). Tahap Baca mengajak mahasiswa untuk mengonsumsi konten proklamasi secara sadar dan terstruktur menggunakan lembar analisis tiga lapis Barthes sebagai panduan. Tahap Bongkar menuntun mahasiswa untuk secara sistematis mengidentifikasi konstruksi konotasi dan mitos yang beroperasi dalam konten tersebut, dengan mengajukan pertanyaan kritis mengenai representasi, eksklusi, dan kepentingan ideologis yang tersembunyi. Tahap Bangun mendorong mahasiswa untuk memproduksi konten alternatif yang lebih berimbang dan inklusif, baik melalui proyek pembuatan konten media sosial yang memuat narasi yang lebih representatif maupun melalui aktivitas *fact-checking* dan analisis komparatif lintas platform. Pendekatan tiga tahap ini tidak hanya mengembangkan kapasitas analitis, tetapi juga membangun agensi mahasiswa sebagai produsen wacana digital yang bertanggung jawab, sebuah dimensi yang selama ini masih jarang disentuh dalam kurikulum PPKn yang ada.

Kerangka pedagogis yang diusulkan ini juga memiliki relevansi langsung dengan tantangan era *post-truth* yang diidentifikasi oleh Rahmawati dkk. (2022). Dalam lanskap informasi di mana narasi nasionalistis-heroik dapat tersebar secara masif dan instan melalui algoritma platform digital, kemampuan mendekode mitos bukan sekadar keterampilan akademis, melainkan merupakan bentuk pertahanan epistemis yang vital bagi warga negara demokratis. Mahasiswa PPKn yang kelak menjadi guru kewarganegaraan memiliki tanggung jawab strategis untuk membekali peserta didik mereka dengan kemampuan serupa, sehingga investasi pedagogis pada level perguruan tinggi ini memiliki dampak berlipat ganda yang

melampaui individu mahasiswa itu sendiri. Dengan memposisikan analisis semiotik sebagai kompetensi kewarganegaraan digital, bukan semata sebagai metode akademis, penelitian ini menawarkan landasan konseptual untuk transformasi kurikulum PPKn yang lebih responsif terhadap realitas ekologi informasi digital yang terus berkembang, dan yang lebih serius dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan wacana kebangsaan di ruang publik digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana proklamasi kemerdekaan 1945 di ruang digital dikonstruksi secara dominan melalui kerangka mitos nasionalistis-heroik yang menaturalisasi narasi perjuangan elit nasional sebagai satu-satunya kebenaran historis, dengan meminggirkan kontribusi rakyat biasa, perempuan, dan kelompok marjinal. Analisis semiotika Roland Barthes mengungkapkan bahwa konten proklamasi di Instagram, TikTok, dan YouTube bekerja pada tiga lapis makna yang saling memperkuat denotasi historis, konotasi ideologis, dan mitos kultural yang secara kolektif membentuk dan mereproduksi identitas kebangsaan tertentu di ruang digital. Di sisi lain, kapasitas literasi kewarganegaraan digital mahasiswa PPKn dalam mendekode konstruksi semiotik tersebut masih terbatas pada tingkat literasi teknis dan informasional, sementara kemampuan membongkar mitos ideologis dalam konten proklamasi masih memerlukan penguatan yang signifikan. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya transformasi kurikulum PPKn yang mengintegrasikan analisis semiotik sebagai kompetensi inti literasi kewarganegaraan digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) pengembangan modul pembelajaran PPKn berbasis analisis semiotik konten digital kebangsaan yang dapat diintegrasikan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Digital atau sejenisnya; (2) pelatihan kompetensi analisis semiotik bagi dosen dan guru PPKn sebagai prasyarat pedagogis; dan (3) kajian lebih lanjut dengan cakupan platform dan subjek yang lebih luas untuk menghasilkan generalisasi yang lebih kuat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan platform dan jumlah informan yang terbatas pada satu institusi, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif antarinstitusi dan antarplatform akan memperkaya pemahaman tentang fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Rahayu, D., Ulum, B., & Putu Eka Putra, A. (2025). Literasi Digital Dalam Pembelajaran PKN Berbasis Saintifik untuk Penguatan Civic Disposition Mahasiswa. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*, 6(3), 1642–1649. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5804>
- Barthes, R., & Heath, S. (2020). *Image Music Text*. Fontana Press.
- Budirahayu, T., & Saud, M. (2023). Pedagogical innovation and teacher collaborations in supporting student learning success in Indonesia. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2271713>
- Gonzalez-Mohino, M., Rodriguez-Domenech, M. Á., Callejas-Albiñana, A. I., & Castillo-Canalejo, A. (2023). Empowering Critical Thinking: The Role of Digital Tools in Citizen Participation. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 12(2), 258–275. <https://doi.org/10.7821/naer.2023.7.1385>
- Hall, Stuart. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications Ltd.
- Hobbs, Renee. (2010). *Digital And Media Literacy : A Plan Of Action : A White Paper On The Digital And Media Literacy Recommendations Of The Knight Commission On The Information Needs Of Communities In A Democracy*. Aspen Institute.

- <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED523244.pdf>
- John W. Creswell. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Edisi ke-3).
- Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., & Liu, J. (2021). Does Media Literacy Help Identification of Fake News? Information Literacy Helps, but Other Literacies Don't. *American Behavioral Scientist*, 65(2), 371–388. <https://doi.org/10.1177/0002764219869406>
- Mogensen, K. (2014). Henry Jenkins, Sam Ford & Joshua Green: Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture. New York, USA: New York University Press. 2013. *MedieKultur: Journal of Media and Communication Research*, 30(56), 191–194. <https://doi.org/10.7146/mediekultur.v30i56.16054>
- Mukodas, M., Mukhtar, R. H., Ekowati, A., Effendi, R., & Zistiana, W. (2025). Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Postingan Bertema Politik Pada Instagram Akun @Tempodotcom. *Triangulasi: Jurnal Pendidikan Kebahasaan, Kesastraan, Dan Pembelajaran*, 5(2), 158–169. <https://doi.org/10.55215/triangulasi.v5i2.40>
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2023). Strengthening civic literacy among students through digital literacy in society 5.0. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 17(2), 215–220. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i2.20746>
- Purwantiningsih, A., Riyanti, D., & Prasetyo, D. (2022). Digital Citizenship in Indonesia: Digital Literacy and Digital Politeness Using Social Media. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 628. <https://doi.org/10.17977/um019v7i3p628-637>
- Safiq, F. N., Ma'arif, M., Putri, A., & Sofie, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Literasi Digital dalam Optimalisasi Pendidikan Politik Mahasiswa PPKn UAD. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 37–42. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v7i1.1063>
- Sumiatun, S. P., Muslim, B., Putri, A. M., & Listyaningsih. (2026). MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL DAN KETAHANAN TERHADAP HOAKS MELALUI PEMBELAJARAN PPKn: ANALISIS CIVIC KNOWLEDGE, SKILLS DAN DISPOSITION. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 14(1), 126–135. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n1.p126-135>